



PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat perkenan Rahmat-Nya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 dapat diselesaikan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan ini pada dasarnya merupakan terjemahan dari Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan untuk kurun waktu satu tahunan. Dokumen ini menjadi acuan dalam melaksanakan kewenangan Sekretariat Daerah sekaligus rujukan dalam melaksanakan evaluasi kinerja.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja PD memiliki arti yang sangat strategis dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja. Dokumen ini menjelaskan tentang besarnya target yang akan dicapai selama tahun 2025 setelah evaluasi semester Pertama, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan sempurnaan dalam penyusunan dokumen ini. Oleh karena itu saran perbaikan dari semua pihak yang berkompeten akan sangat kami hargai.

Akhirnya semoga dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Tenggarong, September 2025

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara,



Dr. H. Sunggono, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19671004 198701 1001

Daftar Isi

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN ii TAHUN 2021	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja_PD	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	35
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Program dan Kegiatan	39
BAB IV PENUTUP	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD).

Perubahan Renja adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Perubahan Renja mengacu pada kerangka kebuakan yang dirumuskan dalam RKPD. Renja dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi (Permendagri 86/2017, pasal 343):

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut maka, RKPD dan Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2025, diperlukan perubahan dalam rangka mengakomodir kebutuhan pelayanan

terhadap masyarakat yang belum terfasilitasi dalam Renja Murni tahun 2025.

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten. Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 Asisten yaitu (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, (3) Asisten Administrasi Umum. Dimana masing-masing Asisten membawahi 4 Bagian.

Rencana Kerja Perubahan adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk tahun 2025 yang disusun sebagai dasar acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025 dengan menyesuaikan kondisi terkini dan mengakomodir kebutuhan yang belum terselesaikan di tahun 2024, dan selanjutnya dokumen perubahan perencanaan tersebut akan menjadi panduan dalam menyelesaikan kinerja tahunan yang akan disajikan dalam Perubahan Rencana Kerja pada tahun berjalan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Capaian Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Capaian Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.90 tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-3780 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025;
 14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Sekretariat Daerah.
 15. Surat edaran Bupati Kutai kartanegara Nomor B-3054/BAPP/065.11/07/2025 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 adalah :

1. Untuk menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahunan sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (PRKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.
2. Dijadikan sebagai salah satu instrumen acuan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada APBD Tahun 2025.

3. Untuk menyesuaikan antara pembiayaan dan kondisi terkini dilapangan dalam proses penyelesaian kegiatan.
4. Sebagai parameter untuk lebih meningkatkan kinerja program, Kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam tahun anggaran berjalan.

1.4 Sistematika Penulisan

Naskah Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja_PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian
- b. Kaidah kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja_PD

Evaluasi pelaksanaan Renja Semester 1 tahun 2025 dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja Sekretariat Daerah melalui analisis terhadap kinerja output dan kinerja keuangan. Pencapaian kinerja output akan menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas, sedangkan pencapaian kinerja keuangan akan menggambarkan seberapa besar pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam menunjang pencapaian sasaran output.

Program nasional menurut Permendagri 90 tahun 2019 dan kepmendagri 050- 3078 tahun 2020, yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk bidang pemerintahan terdapat 3 program yang meliputi: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, Program Perekonomian Dan Pembangunan. Ketiga program tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dilingkungan Sekretariat Daerah, program ini dilaksanakan dibawah Asisten Administrasi Umum yang diampu oleh 4 Bagian, diantaranya Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta Bagian perencanaan dan Keuangan.

Program ini dilaksanakan dalam rangka membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan.

Tugas Bagian Umum diantaranya melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga. Tugas bagian Organisasi adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi. Untuk bagian Potokol dan Komunikasi Pimpinan bertugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi. Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki tugas melaksanakan penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan

Hingga semester 1 tahun 2025 program ini telah terlaksana dengan kisaran capaian kinerja di angka 50% hal ini diantaranya pelaksanaan pembiayaan rutin kantor, pelaksanaan protokoler pimpinan serta penyediaan gaji ASN dan non ASN dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini merupakan tugas pokok dan fungsi asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah untuk membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kerjasama, dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.

Program ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama, pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra; pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak

diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesra.

Dalam implementasinya program ini diampu oleh 4 bagian dalam struktur Organisasi Sekretariat Daerah diantaranya : Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum dan Bagian Kerjasama.

c. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Program Perekonomian dan pembangunan dilaksanakan dibawah kendali asisten perekonomian dan pembangunan yang bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam. Program ini diampu oleh 4 bagian diantaranya bagian pembangunan, bagian ekonomi, bagian Pengadaan Barang/Jasa dan bagian sumber daya alam.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target tertentu sangatlah diperlukan. Besar kecilnya anggaran yang diperlukan tergantung pada seberapa besar fungsi yang dilaksanakan oleh suatu SKPD. Jika anggaran tersedia secara memadai maka target yang ingin dicapai untuk mewujudkan indikator tertentu akan cenderung tercapai. Sebaliknya jika anggaran tidak tersedia secara memadai maka akan sulit untuk mencapai target yang diharapkan.

Faktor lain yang diyakini turut berpengaruh terhadap menurunnya realisasi capaian kinerja indikator kinerja utama pada tahun 2024 adalah faktor sumber daya manusia. Sekretariat Daerah merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Koordinasi antar seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Hingga semester 1 tahun 2025 program Penunjang urusan pemerintah daerah telah terlaksana dengan kisaran capaian kinerja di angka 57% hal ini diantaranya pelaksanaan pembiayaan rutin kantor, pelaksanaan protokoler pimpinan serta penyediaan gaji ASN dan non ASN dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat di semester I tahun 2025 berkisar dibawah 40 %, dan hal yang sama juga terjadi pada program perekonomian dan pembangunan

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Secara umum program yang terlaksana sesuai target capaian yang telah ditetapkan, rata rata target capaian yang ditetapkan di semester I tahun 2025 adalah 50% dan realisasi capaian yang dihasilkan rata rata dibawah diangka 50 %, hal ini disebabkan penyesuaian terhadap skema pembiayaan yang diterapkan oleh BPKAD, dimana tahapan pembiayaan yang di alokasikan untuk semester I menyesuaikan dengan kondisi kas daerah yang ada dimana kas daerah tidak selalu tersedia kecuali untuk belanja wajib mengikat.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Secara umum realisasi Program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025 berkisar diangka 30 % s/d 40 % dan tidak terdapat program ataupun kegiatan yang melampaui target yang ditetapkan akibat ketersediaan anggaran kegiatan yang tidak sesuai rencana. Kekhawatiran terjadinya kegiatan terhutang seperti di tahun 2024 menjadikan para pelaksana kegiatan sangat berhati hati dalam pembiayaan pelaksanaan kegiatan. Harapanya kepastian ketersediaan anggaran segera disampaikan oleh instansi terkait, agar program dan kegiatan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan di awal tahun penganggaran.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Faktor lain yang diyakini turut berpengaruh terhadap menurunnya realisasi capaian kinerja indikator kinerja utama pada tahun 2024 adalah faktor sumber daya manusia. Sekretariat daerah merupakan salah satu OPD dengan jumlah ASN terbesar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, namun banyaknya pegawai tersebut tidak ditunjang dengan kompetensi dan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pernakat daerah tersebut sehingga yang terjadi adalah beban pembiayaan yang besara atas gaji dan tunjangan namun tidak sebanding dengan output yang dihasilkan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra_PD;

Secara umum capaian program Renstra PD masih dalam batas wajar. Keberhasilan pencapaian target kinerja pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik, namun kondisi akan mendapatkan tantangan dimasa yang akan datang. Dimana fenomena perubahan aturan dan ketentuan yang terapkan oleh pemerintah pusat, serta tatangan terhadap rencana perpindahan IKN ke provinsi kalimantan timur yang pasti akan membawa perubahan besar disegala bidang terutama bidang pemerintahan.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Strategi dan kebijakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial disusun sebagai acuan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan sosial. Kebijakan tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam langkah kerja operasional berupa program-program pelayanan maupun program penunjang pelayanan kepada kelompok sasaran. Dalam menentukan program pelayanan instrumen yang harus dipedomani yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri nomor 77 tahun 2020 dan program prioritas nasional

Setiap program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai indikator program. Indikator kinerja program merupakan indikator kinerja manfaat (*outcome*) sedangkan indikator kinerja kegiatan merupakan indikator kinerja keluaran (*output*). Indikator *outcome* bisa diperoleh jika indikator *output* dari masing-masing kegiatan dapat berfungsi. Sedangkan indikator *output* merupakan indikator yang dihasilkan dari pelaksanaan suatu kegiatan. Diantara indikator *output*, *outcome* dan indikator kinerja sasaran memiliki keterkaitan yang sangat erat.

Berdasarkan hasil rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja_PD Tahun 2025 hingga semester Pertama secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Semester I 2025 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program (outcomes), Kegiatan (output)	Target Kinerja Program Renstra PD Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2025			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2026)	
									Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun 2026	Tingkat Capaian Relaisasi Target Renstra(%)
1					2	3	4	5	6	7	8		10 =(5+7+9)	11 =(10/4)
4	1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Aset yang dimanfaatkan dilingkungan Sekretariat Daerah	Persen		77	n.a	n.a		78	100
						Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat BB dan A	Persen		50	n.a	n.a		60	100
						Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah/Pimpinan	Persen		83	n.a	n.a		87	100
						Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Angka/ Nilai		76	n.a	n.a		76	100
4	1	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29	29	381,560,000.00	308,950,000.00	80.97%			
4	1	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	10	175.000.000	138,300,000.00	92.20%		1	10%
4	1	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	10	30.000.000	30.000.000	100.00%		1	10%
4	1	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	60	150.000.000	139,090,000.00	69.55%		3	5%

4	1	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		230	230	62,194,029,829.00	55,434,710,646.00	89.13%		0%
4	1	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	634	634	74.144.961.599	54,053,027,707.00	89.14%	634	100%
4	1	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20	20	100.684.400	181,597,385.00	97.69%	4	20%
4	1	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	60	60	187.370.000	546,493,554.00	86.96%	12	20%
4	1	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60	60	50.000.000	78,440,000.00	92.28%	12	20%
4	1	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	20	20	596.800.000	507,502,000.00	87.63%	4	20%
4	1	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10	10	50,000,000.00	67,650,000.00	84.56%	2	20%
4	1	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1700	1700	854,076,000.00	711,497,800.00	83.31%	50	3%
4	1	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	400	400	78.840.000	85,660,000.00	74.97%	40	10%
4	1	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	1000	1000	126.284.600	61,298,000.00	99.57%	200	20%
4	1	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang dinilai	5	5	60,000,000	51,854,800.00	86.42%	-	0%
4	1	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	5	5	142.660.000	134,370,000.00	89.58%	-	0%
4	1	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaa	1000	1000	151.450.000	378,315,000.00	80.79%	-	0%
4	1	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	3320	3320	244,500,000.00	234,038,620.00	95.72%		0%
4	1	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Pegawai	3320	3320	45.000.000.00	46,560,000.00	100.00%	634	100%
4	1	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	30	6	5,071,372,228.00	4,879,153,581.00	96.21%		#VALUE!
4	1	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	177	177	1.140.000.000	1,109,002,435.00	98.97%	-	0%

4	1	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	34360	34360	4.830.000.000	2,762,603,905.00	97.95%		4,050	12%
4	1	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	200	200	300.000.000	293,349,550.00	95.45%		20	10%
4	1	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	12.401	12.401	100,627,500.00	99,870,000.00	99.25%		995	8%
4	1	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	4339	4339	1.000.000.000	440,629,791.00	95.48%		156	4%
4	1	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	16000	16000	131.550.000	173,697,900.00	66.56%		200	1%
4	1	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	198	198	3,914,540,760.00	3,776,470,729.00	96.47%			0%
4	1	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Pimpinan (sewa)	10	10	7.500.000.000	297,042,200.00	80.89%		-	0%
4	1	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	500	50	80.000.000	3,479,428,529.00	98.09%		-	0%
4	1	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Bag. Umum & Bag. Perencanaan Dan Keuangan)	12	12	15,856,543,105.00	13,932,351,515.00	87.86%		3	25%
4	1	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	50000	50000	45.000.000	46,030,500.00	98.86%		240	0%
4	1	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3170	3170	9.000.000.000	5,726,095,754.00	81.79%		3	25%
4	1	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30	30	3.953.689.200	2,797,432,017.00	96.56%		-	0%
4	1	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	1495	1495	5,912,238,305.00	5,362,793,244.00	90.71%		299	20%
4	1	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	2490	2490	9,644,010,161.00	9,516,481,231.00	98.68%		498	20%
4	1	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	1675	1675	5.103.268.160	943,434,700.00	95.26%		25	1%

					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan								
4	1	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	16	16	39.100.000.000	5,835,800,896.00	99.16%		-	0%
4	1	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	60000	60000	2.000.000.000	1,868,219,635.00	99.58%		-	0%
4	1	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	339	339	1.127.833.794	869,026,000.00	97.40%		-	0%
4	1	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	2	1,918,153,965.00	1,000,487,610.00	52.16%			0%
4	1	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (1 Bupati dan 1 Wakil Bupati) yang menerima gaji dalam 1 tahun	2	2	1.026.463.814	782,366,620.00	85.21%		2	100%
4	1	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (1 Bupati dan 1 Wakil Bupati)	2	0	1,000,000,000.00	218,120,990.00	21.81%		-	0%
4	1	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	213	213	2,158,087,500.00	1,548,612,765.00	71.76%		5	2%
4	1	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5	5	550.000.000	283,147,986.00	54.23%		1	20%
4	1	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	290	290	400.000.000	335,004,600.00	86.89%		30	10%
4	1	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	290	290	1.196.620.000	666,240,179.00	71.14%		30	10%
4	1	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	25	25	400.000.000	264,220,000.00	84.17%		1	4%
4	1	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	6605	6605	13,777,700,450.00	13,394,919,804.00	97.22%			0%
4	1	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	100	100	6.686.728.350	4,050,810,696.00	92.67%		4	4%

4	1	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	45	45	10.814.630.900	8,036,074,519.00	99.24%		5	11%
4	1	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	146	146	1.980.729.000	1,308,034,589.00	99.93%		12	8%
4	1	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan Tata Pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	Persen	100.00		0.00%		100	
						Presentase Rumusan kebijakan bidang kesra yang diimplementasikan	Persen	Persen	100.00		0.00%		100	
						Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP)	Persen	Persen	100.00		0.00%		100	
						Persentase Kerjasama yang di tindak lanjuti	Persen	Persen	85.00		0.00%		85	
4	1	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	170	170	1,061,422,045.00	1,011,972,598.00	95.34%		30	18%
4	1	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	25	25	518.600.000	242,066,395.00	99.79%		2	8%
4	1	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6	6	534,162,245.00	502,037,430.00	93.99%		2	33%
4	1	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5	5	801.448.000	267,868,773.00	94.09%		-	0%
4	1	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Orang/ Lembaga Penerima Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat			33,604,735,800.00	26,353,159,850.00	78.42%			
4	1	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	50	5	64.541.328.052	18,876,973,750.00	80.02%		-	0%
4	1	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5	5	762.000.000	313,800,800.00	94.27%		-	0%
4	1	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan,	4500	4500	45.928.184.151	6,462,385,300.00	71.95%		-	0%

						Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas								
4	1	02	2,03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Regulasi hasil Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2600	2600	862,625,200.00	502,094,881.00	58.21%			0%
4	1	02	2,03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	50	50	500.008.000	209.140.820	53.79%		5	10%
4	1	02	2,03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	30	30	350.000.000	238,589,780.00	72.70%		2	7%
4	1	02	2,03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1 website	1 website	175.000.000	54,364,281.00	37.34%		1	100%
4	1	02	2,04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Daerah	95	95	638,819,000.00	637,634,982.00	99.81%			0%
4	1	02	2,04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10	10	542.000.000	193,273,400.00	99.92%		1	10%
4	1	02	2,04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	5	5	548.514.000	251,159,600.00	99.67%		-	0%
4	1	02	2,04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	40	40	518.000.000	193,201,982.00	99.90%		2	5%
4	1	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	Persen	Persen	100		0.00%		100	
						Persentase permasalahan kebijakan Administrasi pembangunan daerah yang diselesaikan	Persen	Persen	85		0.00%		85	
						Persentase pengadaan barang jasa yang diselesaikan	Persen	Persen	100		0.00%		100	
						Persentase kebijakan Bidang SDA yang ditindaklanjuti	Persen	Persen	100		0.00%		100	
4	1	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	595	595	540,613,600.00	411,546,000.00	76.13%			0%
4	1	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5	5	590.000.000	129,620,000.00	58.23%		-	0%
4	1	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	9	9	531.250.000	163,046,000.00	88.03%		-	0%
4	1	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5	5	600.000.000	118,880,000.00	89.52%		-	0%

4	1	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	140	140	816,425,285.00	675,237,900.00	82.71%			0%
4	1	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	90	90	640,000,000	137,948,900.00	94.07%		-	0%
4	1	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2	25	631.350.385	441,239,000.00	78.75%		-	0%
4	1	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	20	20	259.750.000	96,050,000.00	87.74%		-	0%
4	1	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	915	915	1,188,138,500.00	1,048,247,837.00	88.23%			0%
4	1	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	915	915	800.000.000	344,131,237.00	85.94%		25	3%
4	1	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1	1	1.022.400.000	129,378,000.00	78.70%		1	100%
4	1	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	250	250	916.550.000	574,738,600.00	92.21%		-	0%
4	1	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	305	305	721,914,800.00	616,683,455.00	85.42%			0%
4	1	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	15	15	499.000.000	299,647,455.00	78.54%		-	0%
4	1	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	30	30	324.000.000	159,530,000.00	92.58%		-	0%
4	1	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	30	30	224.000.000	157,506,000.00	93.72%		-	0%
									305.156.548.110	135,994,251,804.00	87.48%			

Tabel 2.2.
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan APBD Tahun 2025
Semester I

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan /Renstra OPD	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (APBD 2022)	Indikator	Target Kinerja Capaian Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja		Target dan Realisasi Pagu Tahun Berjalan (2025)			Ket
			K		K	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (%)	
Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2	Dokumen	1	50	70.400.000	6.493.000	9.22	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Pencapaian Kinerja pada Bagian Perlengkapan	2	Dokumen	0	0	30.000.000	0	0	Laporan disusun Akhir tahun
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Bulan	12	Dokumen	6	50	88.127.784	13.100.000	14.86	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	634	ASN	634	100	59.157.895.716	29.123.346.712	45	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Keuangan	12 bulan	Dokumen Belanja Langsung	0	0	15.496.000	2.843.000	18.35	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Aparatur yang memahami Penatausahaan Keuangan	12	Laporan	0	0	87.370.000	2.385.500	2.73	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Rekonsiliasi Kas dan Peserta Rekonsiliasi	12	laporan	6	50	19.400.000	0	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan	1	Dokumen	0	0	415.860.000	65.420.000	15.73	Laporan disusun Akhir tahun
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Realisasi Belanja 12 Bagian Sekretariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1	Dokumen Laporan Keuangan SKPD	0	0	26.900.000	4.040.000	15.02	Laporan disusun Akhir tahun
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	80	Buku	40	50	27.240.000	6.220.000	22.83	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang Inventaris hasil pengadaan Bagian Umum yang berada pada Gudang Setkab Kutai Kartanegara	200	Unit	105	55	34.700.000	1.669.800	4.81	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah data serta fisik tanah milik Pemerintah	1	Data	0	0	17.200.000	0	0	Laporan disusun Akhir tahun

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan /Renstra OPD	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (APBD 2022)	Indikator	Target Kinerja Capaian Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja		Target dan Realisasi Pagu Tahun Berjalan (2025)			Ket
			K		K	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (%)	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	0	0	142.660.000	0	0	Laporan disusun Akhir tahun
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah barang hasil pengadaan yang ada dan yang akan diadakan serta barang purna pakai	1000	Unit	0	0	41.850.000	0	0	Laporan disusun Akhir tahun
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda									
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas	10	Unit	6	60	1.572.617.320	124.733.700	7.93	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	Unit	0	0	400.000.000	10.940.000	2.74	Dalam Tahap Persiap an
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen	7000	Surat	3	25.0	45.000.000	0	0	Belum tersedia SPD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	317	Rekening	2	16.67	5.600.000.000	2.656.628.182	47.44	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	261	Item	3	25.0	1.856.681.500	165.686.579	8.92	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Administrasi Teknis Perkntoran pada Sekretariat Daerah	298	Orang	131	50.19	500.000.000	7.450.000	1.49	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang Dikelola dan Validasi	634	ASN			10.800.000	4.890.000	45.28	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Peserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	40	Setll						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor	261	Item	131	50.19	500.000.000	7.450.000	1.49	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	51	Jenis	51	100	225.000.000	6.370.000	2.83	Dalam Proses SPM
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	2367	Orang/Hari	233	9.84	700.000.000	186.103.640	26.59	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip	634	ASN	215	33.91	131.550.000	26.987.120	20.51	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	34360	Porsi	4.250	12.37	2.029.990.000	509.387.106	25.09	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang undangan	12401	Eksampler	1.300	1048	100.627.500	67.227.500	66.81	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan /Renstra OPD	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (APBD 2022)	Indikator	Target Kinerja Capaian Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja		Target dan Realisasi Pagu Tahun Berjalan (2025)			Ket
			K		K	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (%)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah layanan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	317	Rekening	10	14.93	812.169.156	238.388.250	29.35	
	Pemeliharaan/Rhabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16	Unit	3	18.75	6.683.949.000	89.166.744	1.33	
	Pemeliharaan/Rhabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6000	M2	40	11	791.476.100	49.687.500	6.28	
	Pemeliharaan/Rhabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara	340	Unit	15	2	1.215.620.222	155.848.329	12.82	
	Penataan Organisasi									
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Evaluasi	1	Dokumen	0	0	550.000.000	90.287.647	16.42	Laporan disusun Akhir tahun
		Jumlah Evaluasi	34	Raperbup	3	5.17				
		Jumlah Dokumen	1	Dokumen	0	0				
		Jumlah Dokumen	1	Dokumen	0	0				
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan	58	Laporan	0	0	400.000.000	53.230.378	13.31	
		Jumlah Evaluasi	25	Laporan	0	0				
		Jumlah Dokumen	3	Dokumen	0	0				
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan RB	2	Dokumen	0	0	1.796.620.000	108.340.436	6.03	
		Jumlah ASN	600	ASN	1.087	97.93				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen dan Aplikasi	4	Dokumen/Ap likasi	1	33.33	179.170.000	43.165.000	24.09	
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan									
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah media cetak dalam publikasi event daerah yang terselenggara	9	Kali			6.554.364.400	1.158.146.620	17.67	
		Jumlah media cetak dalam publikasi event daerah yang terselenggara	315	hari/halaman						
		Jumlah Dokumen PPID	100	Buah	27	27				
		Jumlah data informasi daerah yang ada	1000	Buku						
		Jumlah Pengelolaan websites Protokol dan komunikasi publik	1550	pertayang						
	Fasilitasi Keprotokolan	Pengelompokan Fasilitasi Keprotokolan pada Kegiatan Resmi Pemerintah Kabupaten Dalam 1 Tahun	1000	Kegiatan	252	25.20	4.118.797.350	420.907.068	10.22	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pameran Merah Putih Sanga-Sanga	1	Kegiatan			1.057.000.000	167.595.058	15.86	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan /Renstra OPD	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (APBD 2022)	Indikator	Target Kinerja Capaian Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja		Target dan Realisasi Pagu Tahun Berjalan (2025)			Ket
			K		K	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (%)	
		Dokumentasi dan Peliputan Kegiatan tentative Pemkab	950	Kali	240	25.26				
		Media Cetak dan Display Informasi	3091	M2	774	25.04				
		Pengelolaan hasil Fotografi melalui e- paper	1168	Berita Liputan	294	25.17				
		Pengelolaan hasil videografi melalui tv kabel	689	video Liputan	174	25.25				
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Bupati dan Wakil Bupati	6	25	918.153.965	366.873.000	39.96	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									
	Administrasi Tata Pemerintahan									
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Aparatur	6	Orang			418.600.000	0	0	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang ditangani	12	Kasus	9	75	355.162.245	31.270.000	8.80	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen	3	Dokumen	2	66.67	331.150.000	40.508.530	12.23	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Orang/ Lembaga Penerima Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat								
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dai	50	Dai	50	100	26.549.473.500	5.196.510.850	19.57	
		Jumlah Fasilitasi	1	Fasilitasi	1	100				
		Jumlah Hewan Qurban	26	Ekor	26	100				
		Jumlah Pelaksanaan FKUB seKabupaten Kutai Kartanegara	18	Kecamatan	18	100				
		Jumlah Kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan	11	Kegiatan	11	100				
		Jumlah Jama'ah haji	500	Orang	500	100				
		Jumlah Peserta MTQ Provinsi	110	Orang	110	100				
		Pelaksanaan Safari Ramadhan/ Syawal (Masjid Kab. Kukar)	18	Kecamatan						
		Fasilitasi Kegiatan Pusaka Sakinah Kabupaten Kutai Kartanegara	18	Kecamatan						
		Fasilitasi Kegiatan Fardu Kifayah Kabupaten Kutai Kartanegara	4	Kecamatan						
		Fasilitasi Kegiatan Seleksi Capim Basnas Kukar	1	Kali/even						
		Verifikasi dan Evaluasi Bantuan	73	Berkas						

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan /Renstra OPD	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (APBD 2022)	Indikator	Target Kinerja Capaian Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja		Target dan Realisasi Pagu Tahun Berjalan (2025)			Ket
			K		K	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (%)	
		Hibah dan Bansos Bidang Keagamaan								
		Jumlah kecamatan yang difasilitasi dan diberikan pembinaan terkait kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat	18	Kecamatan						
		Jumlah Raperbup yang terkait pengembangan kualitas pendidikan di pesantren	1	Raperbup						
		Jumlah Raperda tentang Gema	1	Raperda						
		Jumlah Permohonan Bantuan Sosial dan Hibah Bidang Keagamaan Yang diverifikasi	14	Permohonan						
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kegiatan	1	Kegiatan	3	300	342.700.000	326.300.000	95.21	
		Bantuan tepat sasaran kepada korban bencana	18	Kecamatan	3	16				
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Asrama Pelajar dan Mahasiswa Kab Kukar	14	Asrama	7	50	16.169.724.703	317.945.000	1.97	
		Jumlah Fasilitas Olah Raga Sekretariat Daerah	12	Bagian	12	100				
		Jumlah Rancangan Peraturan	1	Perbup	0	0				
		Jumlah Sekolah Berprestasi	18	Kecamatan	0	0				
		Jumlah Santri Penerima Beasiswa Kukar Idaman (Lanjut Perguruan Tinggi)	20	Orang	0	0				
		Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Kukar Idaman (skema Tematik)	200	Orang	0	0				
		Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Kukar Idaman (Stimulan S.1)	800	Orang	0	0				
		Jumlah Penerima Beasiswa Kukar Idaman (Santri Pondok Pesantren)	200	Orang	0	0				
		Jumlah Guru Non PNS Penerima Beasiswa Kukar Idaman	20	Orang	0	0				
		Jumlah Penerima Beasiswa stimulan	2900	Orang	0	0				
		Jumlah Santri Penerima Beasiswa Kukar Idaman (Lanjut Perguruan Tinggi)	20	Orang	0	0				
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum									

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan /Renstra OPD	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (APBD 2022)	Indikator	Target Kinerja Capaian Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja		Target dan Realisasi Pagu Tahun Berjalan (2025)			Ket
			K		K	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (%)	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Ketetapan Keputusan	500	SK			500.008.000	11.054.000	2.21	
		Jumlah Peraturan Desa	10	Perdes	20	100				
		Jumlah Perbup	30	Peraturan Bupati	30	100				
		Jumlah Raperda	10	Peraturan	13	100				
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Pelaporan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RAN- HAM)	4	Dokumen	24	600	350.000.000	22.355.500	6.39	
		Jumlah Penanganan Kasus/Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	6	Perkara	18	300				
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	45	Orang/Hari/ Kegiatan			175.000.000	10.997.000	6.28	
		Jumlah Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)	1	Website						
	Fasilitasi Kerjasama Daerah									
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kerja Sama	12	Kerja Sama	6	50	450.000.000	101.064.400	22.46	
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Kerja Sama Luar Negeri	1	Kerja Sama	0	0	528.514.000	63.971.100	12.10	Dalam Tahap penyusu sunan Dokumen
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Evaluasi Kinerja	8	Laporan			430.000.000	89.379.200	20.79	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN									
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian									
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	jumlah perusda yang dievaluasi	1	Prusda			440.000.000	72.085.000	16.38	
		Jumlah kecamatan yang dievaluasi Kualitas Air Baku dan Air Produksi	18	Kecamatan	19	105				
		Jumlah OPD dan Jumlah Pelayanan Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara	35	Layanan	1	2.86				
		Jumlah Raperbup	1	Dokumen	6	600				
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida	10	Kecamtan	0	0	381.250.000	39.944.923	10.48	Lap disusun pada smester 3
		Jumlah Objek Pengawasan Peredaran Pangan dan Bahan yang mengandung bahanberbahaya	9	Kecamatan	0	0				
		Jumlah Peningkatan Pengendalian Inflasi Daerah	1	Rakor	0	0				
		Jumlah Objek Pengawasan Distribusi BBM dan LPG bersubsidi	9	Kecamatan	0	0				

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan /Renstra OPD	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (APBD 2022)	Indikator	Target Kinerja Capaian Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja		Target dan Realisasi Pagu Tahun Berjalan (2025)			Ket
			K		K	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (%)	
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	42	Rakor	30	71	497.500.000	0	0	Belum tersedia SPD
		Jumlah Penyelesaian KUKP	18	Kecamatan	2	11.11				
		Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	6	Rakor	1	16.67				
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan									
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Penyelesaian KUKP	18	Laporan	0	0	215.000.000	19534.000	9.09	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan Monitoring dan Pengendalian	7	Laporan	2	34	781.350.385	70.460.366	9.02	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Aplikasi	1	Aplikasi	0	0	159.750.000	0	0	Laporn disusun Akhir tahun
		Jumlah Laporan	1	Laporan	0	0				
		Jumlah monitoring laporan dan Evaluasi	4	Laporan	0	0				
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa									
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Penunjang Kegiatan PBJ	183	Jumlah Paket			500.000.000	87.146.900	17.43	
		Pelaksanaan Inventarisasi Paket, Pelaksanaan Riset dan Analisis Pasar dan MelakukanRapat Koordinasi dengan LKPP terkait Penyusunan dan Pengelolaan E- KatalogLokal/ Sektoral	58	OPD	13	2.19				
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Aplikasi	1	Aplikasi			300.000.000	29.101.000	9.70	
		Jumlah OPD yang Dilayani	58	OPD						
		Jumlah Website	1	Website	1	100				
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Administrasi dan kebutuhan operasional Layanan Pengadaan Barang/Jasa	3	Layanan			525.000.000	74.540.500	14.20	
		Jumlah OPD	58	OPD	9	15.52				
		Jumlah Pokja, Pejabat Pengadaan, PPHP,Tim Penilai Angka Kredit FPPBJ dan Pengelola LPSE	50	Orang	21	42				
		Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan PengadaanBarang dan Jasa Pemerintah	50	Orang	0	0				Keg bimtek belum dilaksan akan
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam									
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Rapat koordinasi/Konsultasi dalam/luar daerah bidang sumber daya alam	15	Rapat / Konsultasi	3	20	499.000.000	92.924.000	18.62	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan /Renstra OPD	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (APBD 2022)	Indikator	Target Kinerja Capaian Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja		Target dan Realisasi Pagu Tahun Berjalan (2025)			Ket
			K		K	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (%)	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi, Ranperbup, dan Evaluasi Perbup	6	Rekomendasi /kebijakan	1	16.67	224.000.000	44.511.500	19.87	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Rekomendasi, Ranperbup, dan Evaluasi Perbup	6	Rekomendasi /kebijakan	2	35	224.000.000	29.434.800	13.14	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara hingga semester I Tahun 2025 relatif tidak menemukan adanya kendala yang berarti. Semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi membantu Bupati dalam menyusun kebijakan, pembinaan dan mengkoordinasikan perangkat daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah dapat digambarkan dengan indikator-indikator sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat capaian kinerja pelayanan Sekretariat daerah, secara sederhana Untuk mengukur capaian kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi berdasarkan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	I Indeks kualitas manajemen kebijakan, koordinasi dan pelayanan administrasi	Indeks			67.04	69.90	72.76	75.41			72.76	75.41	Belum dilakukan penilaian
	1 Indeks kualitas kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	Nilai			87	88	89	90			89	90	Belum dilakukan penilaian
	2 Efektifitas koordinasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	Nilai			65	70	75	80			75	80	Belum dilakukan penilaian
	3 Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan	Nilai			86	91	96	97			96	97	Belum dilakukan penilaian

1	Indeks kualitas kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	Nilai			92	94	96	97			96	97	Belum dilakukan penilaian
2	Efektifitas koordinasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	Nilai			77	78	79	81			79	81	Belum dilakukan penilaian
3	Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama	Nilai			86	87	88	89			88	89	Belum dilakukan penilaian
4	Nilai LPPD	Angka/ Nilai			3.3	3.4	3.5	3.6			3.5	3.6	Belum dilakukan penilaian
1	Indeks kualitas kebijakan daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan SDA	Nilai			81.7	84.7	89.7	91.7			89.7	91.7	Belum dilakukan penilaian
2	Efektifitas koordinasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan SDA	Nilai			65.5	68.5	70.5	75.5			70.5	75.5	Belum dilakukan penilaian
3	Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan SDA	Nilai			77	80	82	85			82	85	Belum dilakukan penilaian

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan

- a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instansi teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diberikan kewenangan melaksanakan urusan wajib pemerintahan. Pelaksanaan kewenangan tersebut selain dipengaruhi oleh kondisi lingkungan internal juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal, Misi Kepala Daerah yang dibebankan Kepada Sekretariat Daerah diantaranya adalah

- a) Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani.
- b) Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya.
- c) Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2. Menjalankan Fungsi Administratif, fungsi Koordinatif dan fungsi Regulatif.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor. 18 tahun 2016 bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif dan penetapan regulasi.

Selanjutnya Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut maka Sekretariat Daerah Kabupaten

Kutai Kartanegara perlu mengkoordinasikan seluruh penyusunan kebijakan daerah untuk mewujudkan visi dan misi bupati tersebut. Demikian juga sebagai koordinator pelaksanaan tugas OPD maka harus dapat memastikan bahwa OPD dapat bekerja selaras dengan visi dan misi bupati dan menetapkan prosedur dalam pemantauan dan evaluasinya. Terkait dengan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara maka Sekretariat Daerah perlu mengoptimalkan fungsi layanan untuk dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
 - 1. Pada tahun anggaran 2025 Jumlah Program yang dilaksanakan Sekretariat Daerah sebanyak 3 Program dengan 19 kegiatan dan 67 Sub Kegiatan.
 - 2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah menyesuaikan jenis, target dan sasaran program maupun kegiatan, Lokasi kegiatan bisa bersifat menyeluruh di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - 3. Total kebutuhan dana/ pagu indikatif di tahun 2025 adalah sebesar Rp. 232.955.687.147,- dengan usulan tambahan sebesar Rp. 28.103.247.194,- pada anggaran perubahan untuk memenuhi kebutuhan yang perlu diakomodir dan pemenuhan Kebutuhan yang bersifat Darurat.
- c. Beberapa penjelasan yang melatarbelakangi Perubahan Renja PD Sekretariat Daerah Tahun 2025 diantaranya adalah:
 - 1. Bagian Perencanaan dan keuangan
Usulan penambahan pagu anggaran dibutuhkan untuk Penataan Gudang Sekretariat Daerah dan Pembayaran Utang Pemda.

2. Bagian Umum

Pada rencana perubahan tahun 2025 bagian umum mengusulkan penambahan anggaran yang akan digunakan diantaranya untuk:

- Penyediaan Bahan Logistik
- Pembiayaan perjalanan Dinas pimpinan
- Pemenuhan Kebutuhan pembiayaan jasa Kebersihan Kantor
- Pembiayaan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung kantor
- Pembiayaan Listrik dan Air

Permasalahan diatas muncul karena anggaran yang tersedia pada APBD murni tahun 2025 hanya cukup untuk membiayai sampai 9 bulan, sehingga diperlukan tambahan biaya untuk pemenuhan kebutuhan sampai akhir tahun 2025.

3. Bagian protokol dan komunikasi pimpinan.

Usulan penambahan pagu anggaran pada bagian Prokompim diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan ruang lingkup protokoler dan komunikasi pimpinan, penambahan ini dibutuhkan karena asumsi anggaran yang tersedia pada APBD murni 2025 kurang, sementara kegiatan pimpinan mengalami perubahan yang signifikan, sementara anggaran yang tersedia saat ini sudah menipis dan tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan

4. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat terdapat penambahan pagu yang digunakan untuk membiayai Sub kegiatan Bina Mental dan Spiritual, dan kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan, diantaranya Rehabilitasi Rumah Ibadah dan Pondok Pesantren, Hibah untuk Organisasi Masyarakat dan Bea Siswa bagi Masyarakat Kutai Kartanegara sesuai kriteria yang ditetapkan.

5. Bagian Perekonomian

Penambahan anggaran pada bagian perekonomian digunakan untuk membiayai study dan koordinasi percepatan Halal Industri Kecil di Kabupaten Kutai Kartanegara.

6. Bagian Pemerintahan

Pada Bagian Tata Pemerintahan penambahan terkait 1 sub kegiatan yaitu Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah yang mana Penambahan Anggaran tersebut untuk Penganggaran Iuran Asosiasi Pemda dan Penambahan diberikan karena reward perolehan Panji penyelenggaraan SPM (standar pelayanan minimal).

- d. Tabel Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2025 dan Perkiraan maju Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rancangan Akhi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																					
Kabupaten Kutai Kartanegara																					
Tahun 2025																					
Sebelum Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3078 Tahun 2020									Sesudah Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3078 Tahun 2020					Bertambah/ Berkurang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perang- kat Daerah Pena- nggung Jawab				
Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Se- mula	APBD 2025	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Se- sudah	APBD 2025		Tar- get	Pagu Indikatif					
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	1					SEKRETARIAT DAERAH											67.100.164.685,00				
4	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kukar	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77 Nilai	163.570.089.854,00	Kab. Kukar	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77 Nilai	176.378.871.902,00	12.808.782.048	77 Nilai	67.100.164.685,00				
4	1	1	2,01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Doku men	341.911.600,00	Kab. Kukar	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Doku- men	281.111.600	60.800.000	7 Doku men	280.000.000,00				
4	1	1	2,01	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Doku men	240.298.000,00	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Doku- men	179498000	(60.800.000,00)	2 Doku men	150.000.000,00	Sekreta riat Daerah			
4	1	1	2,01	6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 doku men	29.120.600,00	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 doku- men	29.120.600	-	2 doku men	30.000.000,00	Sekreta riat Daerah			
4	1	1	2,01	7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Doku men	72.493.000,00	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Doku- men	72493000	-	3 Doku men	100.000.000,00	Sekreta riat Daerah			

4	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 Laporan	72.551.510.029,00	Kab. Kukar	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 Laporan	80.308.450.407	7.756.940.378,00	15 Laporan	78.624.414.562,00	
4	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	700 Orang/Bulan	71.870.016.109,00	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	700 Orang/Bulan	71870016109	-	550 Orang/Bulan	77.952.614.562,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2,02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kukar	Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	55.423.760,00	Kab. Kukar	Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	46273760	(9.150.000,00)	12 Bulan	50.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2,02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kukar	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	12 Laporan	71.388.080,00	Kab. Kukar	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	12 Laporan	7825478458	7.754.090.378,00	12 Laporan	-	Sekretariat Daerah
4	1	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	18.752.280,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	18752280	-	1 Laporan	50.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Keuangan	1 Laporan	520.120.000,00		Jumlah Laporan Keuangan	1 Laporan	532120000	12.000.000,00	1 Laporan	521.800.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2,02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kukar	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	15.809.800,00	Kab. Kukar	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	15809800	-	1 Laporan	50.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kukar			166.436.800,00	Kab. Kukar			295.136.800	128.700.000,00		149.420.000,00	

Sebelum Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3078 Tahun 2020										Sesudah Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3078 Tahun 2020				Bertambah/ Berkurang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perang- kat Daerah Pena- nggung Jawab
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Se- mula	APBD 2025	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Se- sudah	APBD 2025		Tar- get	Pagu Indikatif	
4	1	1	2,03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kukar	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 buku	12.753.600,00	Kab. Kukar	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 buku	12753600	-	80 buku	39.420.000,00	Sekreta riat Daerah
4	1	1	2,03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	1 Lapor an	32.954.000,00	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	1 Laporan	32954000	-	1 Lapor an	35.000.000,00	Sekreta riat Daerah
4	1	1	2,03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang dinilai	1 Lapor an	24.572.000,00	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang dinilai	1 Laporan	24572000	-	1 Lapor an	25.000.000,00	Sekreta riat Daerah
4	1	1	2,03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kukar	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	1 Lapor an	23.592.000,00	Kab. Kukar	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	1 Laporan	152292000	128.700.000,00	1 Lapor an	25.000.000,00	Sekreta riat Daerah
4	1	1	2,03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaa	1 Lapor an	72.565.200,00	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	1 Laporan	72565200	-	1 Lapor an	25.000.000,00	Sekreta riat Daerah
4	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kukar			24.587.000,00	Kab. Kukar			24.587.000,00	-		25.000.000,00	
4	1	1	2,05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Data Pegawai	1 Lapor an	24.587.000,00	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Data Pegawai	1 Laporan	24.587.000	-	1 Lapor an	25.000.000,00	Sekreta riat Daerah

Sebelum Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3078 Tahun 2020										Sesudah Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3078 Tahun 2020				Bertambah/ Berkurang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perang- kat Daerah Pena- nggung Jawab
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Se- mula	APBD 2025	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Se- sudah	APBD 2025		Tar- get	Pagu Indikatif	
4	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kukar			13.271.004.600,00	Kab. Kukar			13.771.004.600,00	500.000.000		6.255.000.000,00	
4	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	261 Jenis	1.140.000.000,00	Kab. Kukar	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	500 Jenis	1.140.000.000	-	261 Jenis	1.140.000.000,00	Sekreta riat Daerah
4	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5436 1 porsi	11.357.492.720,00	Kab. Kukar	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	54361 porsi	11.357.492.720	-	3436 0 porsi	4.830.000.000,00	Sekreta riat Daerah
4	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kukar	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	51 Buah	225.000.000,00	Kab. Kukar	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	100 Buah	225.000.000	-	51 Buah	225.000.000,00	Sekreta riat Daerah
4	1	1	2,06	9	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Peratura n Perunda ng- Undang an	Kab Kutai Kartanegara	1254	-	Kab. Kukar	Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan	1254	-	-	2367 Oran g/Kal i	30.000.000,00	Sekreta riat Daerah
4	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Rapat Koordinasi dan	2368 Oran g/ Kali	416.961.880,00	Kab. Kukar	Jumlah Rapat Koordinasi dan	5756 Orang/ Kal i	916.961.880	500.000.000,00	2367 Oran g/Kal i	30.000.000,00	Sekreta riat Daerah

Sebelum Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3078 Tahun 2020										Sesudah Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3078 Tahun 2020				Bertambah/ Berkurang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perang- kat Daerah Pena- nggung Jawab
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Se- mula	APBD 2025	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Se- sudah	APBD 2025		Tar- get	Pagu Indikatif	
4	1	1	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	634 Berka s	131.550.000,00	Kab. Kukar	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	634 Berkas	131.550.000	-	634 Ber- kas	500.000.000,00	Sekreta riat Daerah
4	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kukar			14.069.249.505,00	Kab. Kukar			17.269.249.505	3.200.000.000		3.648.578.190,00	
4	1	1	2,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Dinas Pimpinan (sewa)	2 unit	744.678.228,00		Jumlah Kendaraan Dinas Pimpinan (sewa)	2 unit	3.944.678.228	3.200.000.000,00	2 unit	3.000.000.000,00	Sekreta riat Daerah
4	1	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10 unit	13.324.571.277,00	Kab. Kukar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10 unit	13.324.571.277	-	100 unit	648.578.190,00	Sekreta riat Daerah
4	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kukar			16.116.701.688,00	Kab. Kukar			15.876.701.688	240.000.000		13.083.016.920,00	
4	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kukar	Jumlah surat menyurat	12 Bu- lan	45.000.000,00	Kab. Kukar	Jumlah surat menyurat	12 Bulan	45.000.000	-	12 Bu- lan	5.000.000,00	Sekreta riat Daerah
4	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kukar	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bu- lan	9.130.994.060,00	Kab. Kukar	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	8.180.994.060	(950.000.000,00)	12 Bu- lan	9.500.000.000,00	Sekreta riat Daerah
4	1	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kukar	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bu- lan	2.951.355.680,00	Kab. Kukar	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	3.661.355.680	710.000.000,00	12 Bu- lan	953.689.200,00	Sekreta riat Daerah

Sebelum Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3078 Tahun 2020										Sesudah Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3078 Tahun 2020				Bertambah/ Berkurang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perang- kat Daerah Pena- nggung Jawab
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Se- mula	APBD 2025	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Se- sudah	APBD 2025		Tar- get	Pagu Indikatif	
4	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	12 Bu- lan	3.989.351.948,00	Kab. Kukar	Jumlah Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	12 Bulan	3.989.351.948	-	12 Bu- lan	2.624.327.720,00	Sekre- tariat Daerah
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kukar			26.093.715.630,00	Kab. Kukar			26.093.715.630			12.312.172.348,00	
4	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	67 Unit	1.309.682.139,00	Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	152 Unit	1.309.682.139	-	67 Unit	1.312.172.348,00	Sekre- tariat Daerah
4	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	16 unit	22.385.507.739,00	Kab. Kukar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	16 unit	22.385.507.739	-	16 unit	8.800.000.000,00	Sekre- tariat Daerah
4	1	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	15 Unit	1.399.404.072,00	Kab. Kukar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	15 Unit	1.399.404.072	-	15 Unit	1.000.000.000,00	Sekre- tariat Daerah
4	1	1	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Kab. Kukar	Jumlah Sarana dan	340 unit	999.121.680,00	Kab. Kukar	Jumlah Sarana dan prasarana	340 unit	999.121.680	-	340 unit	1.200.000.000,00	Sekre- tariat Daerah
4	1	1	2,11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1.991.993.488,00	Kab. Kukar	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1.291.993.488	700.000.000	2 Oran- g	1.972.080.388,00	

Sebelum Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3078 Tahun 2020									Sesudah Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3078 Tahun 2020				Bertambah/ Berkurang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perang- kat Daerah Pena- nggung Jawab	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Se- mula	APBD 2025	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Se- sudah		APBD 2025	Tar- get		Pagu Indikatif
4	1	1	2,11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (1 Bupati dan 1 Wakil Bupati) yang menerima gaji dalam 1 tahun	2 Bupa ti/ wakil Bu- pati	1.058.874.888,00	Kab. Kukar	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (1 Bupati dan 1 Wakil Bupati) yang menerima gaji dalam 1 tahun	2 Bupati/ wakil Bupati	1.058.874.888	-	2 Bupa ti/wa kil Bupa ti	972.080.388,00	Sekreta riat Daerah
4	1	1	2,11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (1 Bupati dan 1 Wakil Bupati)	2	933.118.600,00	Kab. Kukar	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (1 Bupati dan 1 Wakil Bupati)	2	233.118.600	(700.000.000,00)	2 Oran g	1.000.000.000,00	Sekreta riat Daerah
4	1	1	2.1 3		Penataan Organisasi	Kab. Kukar			1.454.142.230,00	Kab. Kukar			1.253.095.900	(201.046.330,)		1.550.000.000,00	
4	1	1	2,13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan	4 Doku men	224.170.800,00	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan	4 Dokum en	194.523.600	(29.647.200,00)	3 Doku men	250.000.000,00	Sekreta riat Daerah
4	1	1	2,13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Pelayanan Publik	3 Lapor an	205.882.920,00	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Pelayanan Publik	3 Laporan	176.016.600	(29.866.320,00)	4 Lapor an	300.000.000,00	Sekreta riat Daerah
4	1	1	2,13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Laporan Peningkatan Kinerja dan RB	1 Doku men	658.024.700,00	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Laporan Peningkatan Kinerja dan RB	1 Aplikasi	596102700	(61.922.000,00)	2 Aplik asi	600.000.000,00	Sekreta riat Daerah
4	1	1	2,13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Doku men	195.267.500,00	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokum en	154.538.200	(40.729.300,00)	2 Doku men	200.000.000,00	Sekreta riat Daerah

Sebelum Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3078 Tahun 2020										Setelah Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3078 Tahun 2020				Bertambah/ Berkurang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perang- kat Daerah Pena- nggung Jawab
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Se- mula	APBD 2025	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Se- sudah	APBD 2025		Tar- get	Pagu Indikatif	
4	1	1	2,13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Doku men	170.796.310,00	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Aplikasi	131.914.800	(38.881.510,00)	2 Aplikasi	200.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.1 4		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Kukar			17.488.837.284,00	Kab. Kukar			19.913.825.284	2.424.988.000	2.424 .988. 000	17.802.560.300,00	
4	1	1	2,14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Kukar	Jumlah Fasilitasi Keprotokolan pada Kegiatan Resmi Pemerintah Kabupaten Dalam 1 Tahun	4 Kegiatan	5.638.402.840,00	Kab. Kukar	Jumlah Fasilitasi Keprotokolan pada Kegiatan Resmi Pemerintah Kabupaten Dalam 1 Tahun	1 Kegiatan	7.505.012.840	1.866.610.000,00	8 Kegiatan	6.802.560.300,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2,14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Kukar	Jumlah data informasi daerah yang dipublikasikan	4 Buku	10.527.626.600,00	Kab. Kukar	Jumlah data informasi daerah yang dipublikasikan	1 Buku	10.527.626.600	-	1000 Buku	9.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2,14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Kukar	Jumlah Dokumentasi dan Peliputan Kegiatan tentative Pemkab	4 Kali	1.322.807.844,00	Kab. Kukar	Jumlah Dokumentasi dan Peliputan Kegiatan tentative Pemkab	1 Kali	1.881.185.844	558.378.000,00	332 Kali	2.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Kukar	Persentase kebijakan Tata Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 Persen	65.485.157.099,00	Kab. Kukar	Persentase kebijakan Tata Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 Persen	80.733.261.995,00	15.248.104.896	100 Persen	1.509.162.245,00	
4	1	2	2.0 1		Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan		1.142.770.000,00	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan		1.268.314.000	125.544.000,00	30 Dokumen	1.509.162.245,00	

Sebelum Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3078 Tahun 2020										Setelah Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3078 Tahun 2020					Bertambah/ Berkurang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perang- kat Daerah Pena- nggung Jawab
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Se- mula	APBD 2025	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Se- sudah	APBD 2025			Tar- get	Pagu Indikatif	
4	1	2	2,01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Kukar	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Monev pelimpahan kewenangan	2 keca mata n	303.791.000,00	Kab. Kukar	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Monev pelimpahan kewenangan	3 kecama tan	446.010.000	142.219.000,00		18 keca mata n	475.000.000,00	Sekreta riat Daerah
4	1	2	2,01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Kukar	Jumlah Konsultasi dan koordinasi	3 Koord inasi	282.992.400,00	Kab. Kukar	Jumlah Konsultasi dan koordinasi	3 Koordin asi	280.157.400	(2.835.000,00)		10 Koord inasi	534.162.245,00	Sekreta riat Daerah
4	1	2	2,01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Doku men	555.986.600,00	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokum en	542.146.600	(13.840.000,00)		3 Doku men	500.000.000,00	Sekreta riat Daerah
4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Kukar			62.909.148.479,00	Kab. Kukar			78.103.665.075,00	15.194.516.596,00			58.087.518.900,00	
4	1	2	2,02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Kukar	Jumlah Peserta Pelatihan Da'i	10 Dai/ Desa	52.240.348.454,00	Kab. Kukar	Jumlah Peserta Pelatihan Da'i	10 Dai/De sa	51.399.648.454	(840.700.000,00)		50 Dai/ Desa	42.385.018.900,00	Sekreta riat Daerah
4	1	2	2,02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Kukar	Jumlah Kegiatan Monev Penyaluran Bantuan kepada korban bencana	3 keca mata n	419.754.944,00	Kab. Kukar	Jumlah Kegiatan Monev Penyaluran Bantuan kepada korban bencana	3 kecama tan	372.983.540	(46.771.404,00)		18 keca mata n	762.000.000,00	Sekreta riat Daerah
4	1	2	2,02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Kukar	Jumlah Pelajar dan Mahasiswa Kab. Kutai Kartanegara yang difasilitasi dalam Asrama.	6 Oran g	10.016.146.681,00	Kab. Kukar	Jumlah Pelajar dan Mahasiswa Kab. Kutai Kartanegara yang difasilitasi dalam Asrama.	6 Asrama	26.098.134.681	16.081.988.000,00		14 Asra ma	15.452.500.000,00	Sekreta riat Daerah

Sebelum Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3078 Tahun 2020										Sesudah Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3078 Tahun 2020				Bertambah/ Berkurang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perang- kat Daerah Pena- nggung Jawab
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Se- mula	APBD 2025	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Se- sudah	APBD 2025		Tar- get	Pagu Indikatif	
4	1	2	2,02	4	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kab. Kukar	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Kelua rga	116.613.650,00	Kab. Kukar	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarg a	116.613.650	-	100 Kelua rga	250.000.000,00	Sekre tariat Daerah
4	1	2	2,02	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kab. Kukar	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Kelua rga	116.284.750,00	Kab. Kukar	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarg a	116.284.750		100 Kelua rga	100.000.000,00	Sekre tariat Daerah
1	2	2			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Kukar			760.871.800,00	Kab. Kukar			760.871.800	-	1.500.000.000	1.200.000.000,00	
4	1	2	2,03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Peraturan Desa	250 Perat uran Desa	300.814.600,00	Kab. Kukar	Jumlah Peraturan Desa	250 Peratur an Desa	300.814.600	-	10 Perat uran Desa	550.000.000,00	Sekre tariat Daerah
4	1	2	2,03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Pelaporan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RAN-HAM)	5 doku men	352.378.800,00	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Pelaporan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RAN-HAM)	5 dokume n	342.378.800	(10.000.000,00)	4 doku men	450.000.000,00	Sekre tariat Daerah

Sebelum Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3078 Tahun 2020										Setelah Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3078 Tahun 2020					Bertambah/ Berkurang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perang- kat Daerah Pena- nggun- Jawab
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Se- mula	APBD 2025	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Se- sudah	APBD 2025			Tar- get	Pagu Indikatif	
4	1	2	2,03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi Hukum dan Pendokumentasian Produk Hukum	200 Orang/Hari/Kegiatan	107.678.400,00	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi Hukum dan Pendokumentasian Produk Hukum	200 Orang/Hari/Kegiatan	117.678.400	10.000.000,00		15 Orang/Hari/Kegiatan	200.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Daerah	21 Dokumen	672.366.820,00	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Daerah	20 Dokumen	600.411.120	(71.955.700,00)		20 Dokumen	808.514.000,00	
4	1	2	2,04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Naskah Kerjasama yang dilakukan Perangkat Daerah dg Pihak ketiga Dalam Negeri	13 Dokumen	238.145.000,00	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Naskah Kerjasama yang dilakukan Perangkat Daerah dg Pihak ketiga Dalam Negeri	12 Dokumen	189.670.000	(48.475.000,00)		12 Dokumen	240.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	2	2,04	2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	2 Dokumen	216.111.020,00	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	3 Dokumen	193.330.320	(22.780.700,00)		1 Dokumen	298.514.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	2	2,04	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Evaluasi bidang kerjasama yang dilaksanakan daerah	6 Dokumen	218.110.800,00	Kab. Kukar	Jumlah Evaluasi bidang kerjasama yang dilaksanakan daerah	6 Dokumen	217.410.800	(700.000,00)		6 Dokumen	270.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kab. Kukar			3.900.440.194,00	Kab. Kukar			3.946.800.444,00	46.360.250			4.181.600.385,00	
4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Kukar			901.839.400,00	Kab. Kukar			1.051.839.400	150.000.000			991.250.000,00	
4	1	3	2,01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen evaluasi Kualitas Air Baku dan Air Produksi di 18 Kecamatan	5 Kecamatan	381.170.000,00	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen evaluasi Kualitas Air Baku dan Air Produksi di 18 Kecamatan	5 Kecamatan	381.170.000	-		18 Kecamatan	390.000.000,00	Sekretariat Daerah

Sebelum Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3078 Tahun 2020										Sesudah Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3078 Tahun 2020					Bertambah/ Berkurang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perang- kat Daerah Pena- nggung Jawab
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Se- mula	APBD 2025	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Se- sudah	APBD 2025			Tar- get	Pagu Indikatif	
4	1	3	2,01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Kukar	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi pengawasan distribusi BBM dan LPG. Bersubsidi	4 keca mata n	245.700.400,00	Kab. Kukar	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi pengawasan distribusi BBM dan LPG. Bersubsidi	4 kecamatan	245.700.400	-	5 keca mata n	351.250.000,00	Sekreta riat Daerah	
4	1	3	2,01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kab. Kukar	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultas Kebijakan Perekonomian	4 Rakor	274.969.000,00	Kab. Kukar	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultas Kebijakan Perekonomian	4 Rakor	424.969.000	150.000.000,00	40 Rakor	250.000.000,00	Sekreta riat Daerah	
4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Kukar			784.248.454,00	Kab. Kukar			784.248.454	-		706.350.385,00		
4	1	3	2,02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Kukar	Jumlah Rancangan Kebijakan Regulasi Daerah/ Raperbup	4 Doku men	384.084.160,00	Kab. Kukar	Jumlah Rancangan Kebijakan Regulasi Daerah/ Raperbup	4 Regulas i Daerah	384.084.160	-	1 Regul asi Daera h	285.000.000,00	Sekreta riat Daerah	
4	1	3	2,02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen laporan Monitoring dan Pengendalian	4 Doku men	285.697.654,00	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen laporan Monitoring dan Pengendalian	4 Laporan	285.697.654	-	5 Lapor an	281.350.385,00	Sekreta riat Daerah	
4	1	3	2,02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Pengolahan Pelporan dan Evaluas	4 Doku men	114.466.640,00	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Pengolahan Pelporan dan Evaluas	4 Laporan	114.466.640	-	1 Aplik asi	140.000.000,00	Sekreta riat Daerah	
4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kukar	Presentase Pelaksanaan PBJ yang akuntabel, efektif dan efesien	100 %	1.537.123.840,00	Kab. Kukar	Presentase Pelaksanaan PBJ yang akuntabel, efektif dan efesien	100 %	1.333.484.090	(203.639.750,00)	100 %	1.730.000.000,00		

Sebelum Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3078 Tahun 2020										Sesudah Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3078 Tahun 2020				Bertambah/ Berkurang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perang- kat Daerah Pena- nggung Jawab
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Se- mula	APBD 2025	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Se- sudah	APBD 2025		Tar- get	Pagu Indikatif	
4	1	3	2,03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kukar	Jumlah OPD yang di Fasilitas	684 OPD	739.639.300,00	Kab. Kukar	Jumlah OPD yang di Fasilitas	684 OPD	577.193.550	(162.445.750,00)	58 OPD	759.000.000,00	Sekreta riat Daerah
4	1	3	2,03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	2 Doku men	445.387.600,00	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	2 Aplikasi	415.090.600	(30.297.000,00)	1 Apli- kasi	521.000.000,00	Sekreta riat Daerah
4	1	3	2,03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kukar	Jumlah ASN peserta Bimbingan Teknis PBJ	218 Oran g	352.096.940,00	Kab. Kukar	Jumlah ASN peserta Bimbingan Teknis PBJ	218 Orang	341.199.940	(10.897.000,00)	50 Oran g	450.000.000,00	Sekreta riat Daerah
4	1	3	2,04	4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Kukar			677.228.500,00	Kab. Kukar			777.228.500	100.000.000,00	3.924 .988. 000,0 0	754.000.000,00	
4	1	3	2,04	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Kebijakan bidang Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	6 Doku men	292.171.300,00	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Kebijakan bidang Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	6 Dokum en	399.213.800,00	107.042.500,00	15 Rapat / Kons ultasi	300.000.000,00	Sekreta riat Daerah
4	1	3	2,04	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Kebijakan bidang pertambangan dan LH	6 Doku men	231.561.300,00	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Kebijakan bidang pertambangan dan LH	6 Rekome ndasi	238.606.300,00	7.045.000,00	6 Reko mend asi	250.000.000,00	Sekreta riat Daerah
4	1	3	2,04	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Kebijakan bidang energi dan air	6 Doku men	153.495.900,00	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Kebijakan bidang energi dan air	6 Rekome ndasi	139.408.400,00	(14.087.500,00)	6 Reko mend asi	204.000.000,00	Sekreta riat Daerah
									232.955.687.147,00				261.058.934.341,00	28.982.880.397		220.145.227.729,	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan yang berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, proses penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2025 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah.

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian ;

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) tahun 2025 dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2025. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 terdiri dari 3 program dan 19 kegiatan serta 63 Sub Kegiatan dengan anggaran Rp. 232.955.687.147,- dan usulan tambahan sebesar Rp. 261.058.934.341,- pada anggaran perubahan untuk memenuhi kebutuhan yang perlu diakomodir dan pemenuhan Kebutuhan yang bersifat Darurat. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja PD Tahun Anggaran 2025.

Catatan Utama yang dapat dihimpun sampai dengan Semester I Tahun 2025 diantaranya :

1. Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan BMD.
2. Pemenuhan Program dedikasi Kukar Idaman terkait Hibah Rumah Ibadah dan Pondok Pesantren, Bea Siswa tematik.

b. Kaidah – kaidah pelaksanaan ;

Berdasarkan panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk kurun waktu satu tahun. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja PD Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kurun waktu 2025 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM

dan sumber pendanaannya serta komitmen seluruh ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra perlu dievaluasi berkala untuk menjamin bahwa target kinerja yang telah disusun masih relevan dengan kebutuhan perkembangan permasalahan yang menjadi tugas dan fungsi sekretariat daerah.

c. Rencana tindak lanjut ;

Rencana tindak lanjut yang diusulkan untuk menyelesaikan catatan kebutuhan yang harus dipenuhi diantaranya adalah penyediaan alokasi anggaran sesuai hasil inventarisasi kebutuhan Semester I yang belum dapat dipenuhi melalui anggaran APBD murni tahun 2025. Serta beberapa penyesuaian belanja sesuai dengan kebutuhan dengan melakukan pergeseran antar rekening belanja.

Perubahan Rencana Kerja PD berisi perubahan perencanaan strategis yang bersifat operasional dalam menterjemahkan tugas dan fungsi perangkat daerah. Perubahan Rencana Kerja PD nantinya menjadi acuan dan pedoman bagi unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun rencana kerja tahunan yang ditandai dengan dituangkannya lokasi, sasaran dan indikator kinerja out put dan out come dari setiap kegiatan. Perubahan Perencanaan ini dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien dan akuntabel, sehingga peningkatan kinerja individu, unit kerja dan organisasi dapat tercapai.

Akhirnya semoga Dokumen Perubahan Renja PD tahun 2025 ini dapat memberikan arahan yang jelas tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Dukungan dalam hal penganggaran sangat diharapkan sehingga capaian target yang telah ditentukan dapat terwujud.